

**PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA  
(Studi Pustaka Gerilya Politik Ekonomi Tan Malaka)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)  
Filsafat Politik Islam**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI K U-2012 08 PI	No. DAFTAR : 4.2012/PI/08 TANGGAL

Oleh:  
**Salman al-Farisi**  
**E04205007**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM  
2012**

















merasakan kebebasan dan berjuang di tengah-tengah rakyat, dan selebihnya ia berada dalam penjara. Terhitung sejak pertama kali ia terjun dalam aktifitas politik yang sebenarnya, yaitu semenjak kepindahannya dari Sumatera (sehabis pulang dari Belanda) ke Jawa pada juni 1921 dan setelah itu bergabung dengan PKI, serta jabatan wakil ketua Komite untuk Asia Timur sempat di tangannya.

Kemudian pembuangannya telah lama menyimpannya, ketika tuduhan mengganggu keseimbangan yang berusaha dijaga oleh pemerintahan Hindia Belanda jatuh padanya, itu terjadi pada maret 1922.<sup>1</sup> Karena itu praktis Tan Malaka hanya mempunyai satu tahun lamanya untuk berjuang, kemudian dari Agustus 1945 sampai Juli 1946 ia juga baru merasakan kebebasannya, selebihnya, sampai saat ini ia tewas terbunuh. Tan Malaka telah banyak menghabiskan waktunya di dalam penjara. Kalau dihitung-hitung, selama hidupnya praktis hanya mempunyai waktu dua tahun lamanya untuk berjuang secara terbuka.

Tan Malaka melakukan pengembaraan selama 20 tahun, dikejar-kejar polisi rahasia di Manila, Hong Kong, Bangkok, Singapura, dan kota-kota lainnya sebelum dia kembali ke Indonesia pada 1942 setelah militer Jepang menguasai Asia Tenggara.

Selama periode pelariannya itu ada brosur yang ditulis Tan Malaka dan diterbitkannya di Canton pada 1924 yaitu *Naar Repoebliek Indonesia (Menuju Republik Indonesia)* dalam bahasa Belanda dan Melayu yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ratusan jilid buku tersebut lantas

---

<sup>1</sup>Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, hal. 6





Dalam studi ini penulis ingin mengatakan bahwa Tan Malaka juga seorang revolusioner nasionalis, perjuangan dan komitmen Tan Malaka yang sangat tinggi dalam membebaskan negerinya begitu jelas terlihat dalam tindak tanduknya. Belum pernah ia terlihat secara umum menginginkan perjuangan kelas yang mengambil posisi penting dalam pemikiran marxisme untuk diterapkan mentah-mentah di Indonesia.

Menurut Safrizal Rambe penulis buku "*Pemikiran Politik Tan Malaka*" Tan Malaka adalah seorang revolusioner, radikal dan kiri, dan begitupun dalam pandangan kami penulis, menurut kami Tan Malaka merupakan seorang yang mampu memikirkan masa depan Indonesia dan sangat nasionalis.

Dalam sistem berfikirnya, Tan Malaka banyak menempatkan nasionalisme sebagai hal terpenting, baginya nasionalisme adalah perwujudan dari kemerdekaan Indonesia yang didasarkan atas sosialisme dan bersatunya kekuatan-kekuatan revolusioner, terutama kekuatan Islam dan nasionalis serta komunis. Pada mulanya ia memang berharap banyak dari PKI sebagai partai pelopor, namun bukan sama sekali untuk memonopoli dunia pergerakan. Tan Malaka yakin bahwa PKI tidak akan mampu memonopoli dunia pergerakan. Tan Malaka yakin bahwa PKI tidak akan mampu memonopoli dan berjuang sendiri melawan Belanda yang kuat dan otoriter, apalagi ia mengetahui bahwa PKI sebagai organisasi politik belum berakar di dalam masyarakat ketika itu. Ia menambahkan bahwa dalam Negara yang berpenduduk mayoritas Islam, maka serikat Islam adalah suatu kekuatan revolusioner yang harus didukung.

Seperti apa yang dijelaskan oleh Safrizal Rambe; bahwa Tan Malaka, tokoh yang kontroversial. Walaupun ia menjadi ketua PKI dan wakil Komintern untuk Asia Timur pernah dijabat, bukanlah dia berarti komunis dalam pengertian umum yang biasa, setidaknya ia bukan orang yang dogmatis dan doktriner dalam menerjemahkan ajaran marxis.

Selama ini Tan Malaka dilihat sebagai pemimpin komunis, walaupun demikian ada sisa menarik yang sebenarnya terdapat pada diri Tan Malaka. Yaitu aspek nasionalnya yang selama ini kurang dieksplorasi dan diekspose.<sup>5</sup> Sehingga kesan yang terekam dalam benak kita saat ini adalah Tan Malaka yang sangat Marxian, bahkan tak jarang tudingan sebagai pemberontak, kafir, sesat yang di alamatkan padanya.

Penulis tidak akan mengkaji Pemikiran Tan Malaka secara umum, akan tetapi ada beberapa catatan penting yang fenomenal dan pantas untuk dikaji ulang oleh penulis. Yaitu Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi), karya cipta Tan Malaka yang ditulis dalam penjara di Madiun pada tahun 1948. Gerpolek adalah gerilya politik maupun ekonomi, yang di dalamnya berisi tentang cara bergerilya dalam politik dengan strategi militer, maupun dengan merebut kekayaan milik asing. Keduanya menjadi satu dan saling menguatkan.

Menurut Tan Malaka dalam buku Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek), sang gerilya adalah seorang putra atau putri, seorang pemuda atau pemudi Indonesia, yang taat dan setia kepada proklamasi dan kemerdekaan 100% (*seratus*

---

<sup>5</sup>Ini dikuatkan dengan keputusan presiden No. 53 Tahun 1963 yang menyatakan Tan Malaka sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pidato Presiden Soekarno.









percakapan, politik lebih mengacu pada kebijakan-kebijakan umum dan alokasi daripada kepada proses intern organisasi-organisasi swasta.<sup>6</sup>

**3. Ekonomi** : Segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya

**4. Tan Malaka** : Nama lengkap Tan Malaka yaitu Ibrahim Datuk Tan Malaka, menurut garis keturunannya ia termasuk suku bangsa Minangkabau. Ia lahir pada tanggal 2 Juni 1894 di Desa Pandan Gadang Sumatra Barat. Ia termasuk salah seorang tokoh bangsa yang sangat luar biasa, bahkan dapat dikatakan sejajar dengan tokoh-tokoh Nasional yang membawa bangsa Indonesia sampai saat kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Moh.Yamin dan lain-lain.

## F. Kajian Pustaka

1. Gerpolek (*Gerilya Politik Ekonomi*), Merupakan kumpulan tulisan Tan Malaka sendiri yang didalamnya menguraikan tentang sejarah perjuangan Indonesia dari gerakan, gerilya politik dan ekonomi serta perlawanan, dan perjanjian-perjanjian (diplomasi) terhadap kolonial.

---

<sup>6</sup>Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, hal. 258

2. *Tan Malaka, Biografi Singkat*, yang ditulis oleh Taufik Adi Susilo yang banyak memuat tentang riwayat hidup, petualangan lintas Negara, pemikiran, gerakan politik yang ditunjukkan oleh Tan Malaka kepada penguasa saat itu.
3. Pemikiran politik Tan Malaka yang ditulis oleh Safrizal Rambe, dalam buku ini banyak mengupas tentang pemikiran politik Tan Malaka dari perjuangannya membentuk sekolah rakyat sampai pada kemerdekaan Indonesia.
4. *Apa, Siapa dan bagaimana Tan Malaka*, merupakan kumpulan-kumpulan artikel, membahas tentang pemikiran Tan Malaka baik itu pemikiran Politik maupun Ekonomi yang ditulis oleh Tan Malaka sendiri dan oleh pejuang yang se-zaman dengan Tan Malaka, kemudian dibukukan oleh DP. Arsal, SH. Yang merupakan salah satu pelaku sejarah pada waktu itu.
5. *Madilog*; Penulis menemukan dalam penelitian ini, langsung dari karya Tan Malaka sendiri, tokoh yang menjadi fokus bahasan, dalam karyanya ini penulis temukan bagaimana sosok Tan Malaka menguraikan pemikirannya tentang pentingnya Dialektika selain logika, hal ini tertera pada pokok bahasan Dialektika.
6. Harry A. Poeze dalam bukunya yang berjudul *Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia*, yang diterjemahkan oleh Hersri Setiawan, mencoba menampilkan Perjalanan Hidup Tan Malaka dari mulai tanah Minang sampai ke daratan Eropa dan di sanalah Tan Malaka mulai mengenal pemikiran-pemikiran tentang kefilosofan.







## BAB II

### Biografi Tan Malaka

#### A. Riwayat Hidup

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, panggilan akrabnya pada waktu itu adalah Ibrahim. Menurut Harry A. Poeze, seorang ahli sejarah dan guru besar berkebangsaan Belanda mengatakan bahwa, tahun kelahiran Tan Malaka secara tepat tidak diketahui. Karena pada waktu itu belum ada *register* (daftar) penduduk bagi orang Indonesia.

Harry A. Poeze cenderung untuk menganggap tahun 1894 sebagai tahun kelahiran Tan Malaka yang paling tepat, melihat fakta bahwa pada tahun 1903 ia mengikuti pendidikan di sekolah rendah. Maka, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika itu ia berusia kurang lebih 6 tahun.<sup>8</sup>

Tan Malaka menyatakan bahwa keluarganya beragama Islam dan beradat asli Minangkabau. Ia lahir dalam kultur yang peduli terhadap pendidikan dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan juga keluarganya termasuk taat kepada ajaran Islam.<sup>9</sup>

Tan Malaka memulai pendidikannya dengan masuk sekolah kelas II Suliki dari 1903-1908, kemudian guru-gurunya mendorong dan membantu agar Ibrahim melanjutkan pendidikannya karena anak didik mereka mempunyai otak yang cerdas dan tajam. Atas bantuan mereka, Ibrahim melanjutkan pendidikan ke

---

<sup>8</sup>Poeze A Harry, *Tan Malaka Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia*, Penj. Hersri Setiawan, Jilid I, (Jakarta, Y.O.I 2008), hal 15.

<sup>9</sup>Malaka, Tan, *Dari Penjara Ke Penjara Bagian II*, Cet. II, (Jakarta: Teplok, 2000), hal 72.

sekolah guru-guru negeri atau sekolah raja. Sekolah ini merupakan tempat pendidikan untuk guru-guru pribumi di *fort de kock* atau *bukit tinggi*.

Setelah tamat belajar disekolah guru pada Oktober 1913, bersama keluarga horensma, guru disekolah raja yang menganggapnya sebagai anak sendiri, Tan Malaka berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di *Rijks kweek School* (sekolah guru) di Harleem atas bantuan biaya dari yayasan Engku Fond.<sup>10</sup> Biaya itu dianggap sebagai pinjaman yang akan dibayarnya kelak apabila sudah bekerja dan sudah berpenghasilan.

Di Belanda, watak Tan Malaka terbentuk: membaca, belajar, dan menderita. Di sana dia menutupi kekurangan uang dengan belajar bahasa melayu, sambil berusaha menyelesaikan sekolah, dan berjuang melawan sakit bronkritis, yang bermula hanya karena tidak memiliki baju hangat pada musim dingin. Dia bahkan pernah mencalonkan diri untuk Tweede Kamer (parlemen) Belanda mewakili negeri jajahan.

Tan Malaka lalu berkenalan dengan teori revolusioner, sosialisme, dan Marxisme-komunisme melalui berbagai buku dan brosur. Bahkan dia sempat diminta Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) mewakili Indische Vereeniging dalam kongres pemuda Indonesia dan pelajar Ideologi di kota Deventer. Melalui interaksi dengan mahasiswa Indonesia dan Belanda, dia semakin yakin bahwa keyakinan itu dia pegang secara konsisten. Itulah masa awal dalam pengembangan politiknya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Suwarto, Wasid. *Mewarisi Gagasan Tan Malaka*, (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2006). Hal 29

<sup>11</sup>Andi susilo, Taufik. *Tan Malaka, Biografi Singkat*, (Jogjakarta, garasi, 2008). Hal 15

Pada November 1919, setelah kecamuk perang dunia I usai, Tan Malaka pulang ke Indonesia. Ia kembali ke Indonesia untuk bekerja sebagai guru di Tanjung Morawa ini, matanya mulai terbuka ketika Tan Malaka melihat betapa kejamnya sistem kapitalis yang dipraktekkan di perkebunan tersebut yang memperlakukan bangsanya sebagai kuli kontrak. Sistem kapitalis itu melilit dan membelenggu kuli kontrak hingga pasrah menerima nasib mereka. Kuli-kuli kontrak perkebunan itu tidak berdaya dan tidak ada orang yang memperdulikan mereka. Maka terjadilah penindasan dan penghisapan manusia atas manusia.

Dengan pikiran jernih dan hati yang mantab Tan Malaka menentukan pilihan meninggalkan semua kemewahan, keistimewaan, dan kenikmatan sebagai guru perkebunan yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Belanda. Tan Malaka membuat anjang-ancang dan persiapan untuk menerjunkan diri sepenuhnya kemedan politik guna memperjuangkan nasib bangsa melawan sistem kapitalis kolonial yang menjajah tanah air Indonesia.

Tan Malaka memutuskan berhenti dari pekerjaannya kemudian berlayar ke Jawa dengan tujuan ke Semarang untuk menemui teman-temannya yang telah dihubunginya. Mereka bersedia membuka jalan bagi Tan Malaka untuk memasuki arena perjuangan politik. Cita-cita dan tekak yang sudah lama dipendamnya adalah mendirikan perguruan yang cocok dengan keperluan dan jiwa rakyat murba.

Ketika bertemu dan bertukar pikiran dengan Semaun, Semaun berkata, “nanti kami akan berusaha agar saudara dapat memimpin perguruan. Ini memang sudah pada tempatnya”.<sup>12</sup> Beberapa waktu kemudian, Semaun membuat rapat

---



istimewa bagi anggota Sarekat Islam (SI) Semarang dan mengusulkan pendirian sebuah perguruan. Usul ini diterima dengan baik, dan pendaftaran bahkan dimulai hari itu juga. Gedung sekolah tidak menjadi halangan karena Sarekat Islam (SI) Semarang mempunyai gedung sendiri untuk rapat. Untuk sementara, gedung tersebut akan dijadikan sebagai sekolah. Perlengkapan belajar juga dikumpulkan secara bergotong royong.

Dalam waktu dua tiga hari saja, Tan Malaka sudah bisa memulai mengajar disekolah tersebut dengan 50 murid baru. Dalam brosur kecil Sarekat Islam Semarang dan *Onderwijs*, Tan Malaka memaparkan dasar dan tujuan perguruan itu serta mencapai tujuannya.

Sekolah itu resminya bernama sekolah rakyat tetapi masyarakat mengenalnya sebagai sekolah Tan Malaka. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Tan Malaka sendiri mengungkapkan dalam tulisan otobiografinya dari penjara kepenjara dan mengutip dari ensyclopaedia Van Nederlands oet indie Vi Supplement halaman 534 yang diterjemahkannya:

“dimana-mana berdiri sekolah rakyat model Tan Malaka. Diantara pekerjaan murid termasuk juga pembentukan barisan muda Sarekat Pemuda dan Kepanduan, saat waktu luang dibuat kursus kilat untuk membentuk propagandis yang aktif, sebagai warga rumekso yang akan menjadi kader organisasi. Awalnya dalam rapat terbuka, kemudian dalam rapat anggota atau rapat tertutup terbatas”.

<sup>13</sup>

Demikianlah gambaran sekilas tentang kegiatan Tan Malaka dalam bidang pendidikan sebagai awal aktifitasnya dalam medan perjuangan bangsa.

---

<sup>12</sup>Suwarto, Wasid, *Mewarisi Gagasan*, hal 31.

<sup>13</sup><http://everythingaboutcancers.blogspot.com> jam 15.00 Wib. Tanggal 05,01,2012

Tahun 1921-1922 merupakan permulaan nyata bagi karir politik Tan Malaka karena dia mendirikan sekolah rakyat yang pertama di Semarang. Keadaan waktu itu tidak memungkinkan dia membatasi kegiatannya hanya dalam bidang pendidikan saja. Kaum buruh sedang menggeliat, bergerak menghadapi kekejaman pertumbuhan kapitalisme kolonial Hindia Belanda. Jumlah tenaga pimpinan, kader, dan aktifis perjuangan masih terbatas.

Maka, mau tidak mau Tan Malaka terseret untuk terjun dalam gerakan buruh. Pertama, dia terpilih menjadi wakil ketua Serikat Pegawai Pelikan Hindia (SPPH Tambang Minyak Cepu), dengan Semaun sebagai pendiri dan ketuanya. Kemudian dia juga terpilih sebagai ketua merangkap bendahara Sarekat Pegawai Percetakan.

Pada waktu Semaun berangkat ke luar negeri guna menghadiri kongres buruh di Moskow dan melakukan kegiatan lain sehingga cukup lama meninggalkan Indonesia. Akibatnya jabatan ketua PKI kosong, sementara banyak masalah perjuangan yang harus ditangani. Akhirnya pada Desember 1921, PKI mengadakan Kongres VIII SI Semarang. Untuk menghindari kekosongan ketua, Kongres memilih Tan Malaka mewakili Semaun menjadi ketua Partai sekalipun ia sudah menyatakan keberatannya. Dengan jabatan baru ini, tentu saja kegiatan politiknya, di samping kegiatan dalam pergerakan buruh dan pendidikan, makin meningkat dan makin menonjolnya sebagai tokoh gerakan. Posisi seperti itu dengan sendirinya menyebabkan Tan Malaka menjadi sasaran penangkapan dan penahanan penguasa kolonial.

Waktu itu Tan Malaka baru berusia 25 tahun dan dia juga menjadi anggota dewan Gemeente (Dewan Kota) Semarang. Pada 13 Februari 1922, ketika berada di Bandung untuk memeriksa gedung Sekolah Rakyat kedua, akhirnya Tan Malaka yang kegiatan dan gerak-geriknya dengan ketat dan tajam selalu diikuti Polisi Rahasia Belanda (PID) ditangkap dan ditahan. Sebenarnya penangkapan ini sudah lama diantisipasi, penyebab utamanya adalah pemogokan pegawai pegadaian.

Tan Malaka dibuang keluar Indonesia atau tepatnya di Kupang, Pulau Timor pada tanggal 2 Maret 1922 oleh putusan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi Tan Malaka minta dibuang keluar Hindia Belanda, setelah perdebatan seru antara sesama pejabat Hindia Belanda, permintaan Tan Malaka itu dikabulkan sesuai putusan pemerintah tanggal 10 Maret 1922 no. 2 isinya menyatakan bahwa Tan Malaka secepatnya harus meninggalkan Hindia Belanda dan segala ongkos perjalanan menjadi tanggungan sendiri.<sup>14</sup>

Pada waktu itu Tan Malaka menulis sebuah brosur pembelaanya berjudul Tunduk Kepada Kekuasaan Tetapi Tidak Tunduk Kepada Kebenaran. Tanggal 29 Maret 1922, dengan kapal Insulinde Tan Malaka bertolak dari Tanjung Priok dengan pengawalan ketat. Ia berlayar melalui Teluk bayur, Padang. Di tempat ini dia dilarang turun kedarat menemui teman-teman dan anggota keluarganya yang siap menemaninya untuk memberi salam perpisahan.

---

<sup>14</sup>Suwarto, Wasid, *Mewarisi Gagasan*, hal 34.

Dengan pembuangan itu, dimulailah perjuangan Tan Malaka di luar Negeri, di gelanggang Internasional. Setelah lebih 20 tahun berikutnya, barulah ia menyusup masuk kembali ke tanah air.

Dalam Kongres Komintern IV tahun 1922 yang diadakan di Moskwa Tan Malaka hadir mewakili Indonesia. Di sana ia mendapat sorotan tajam karena menentang sikap permusuhan Komintern terhadap Pan-Islamisme yang dianggap sebagai kekuatan Borjuis yang tidak dapat dipercaya.

Tan Malaka menekankan potensi revolusioner Islam di wilayah-wilayah jajahan dan pentingnya bekerja sama dengan mereka. Di Indonesia, sejak awal penjajahan Belanda sampai akhirnya kebangkitan kesadaran Nasionalisme, pemberontakan melawan penjajah selalu dilakukan oleh potensi Islam, antara lain SI. Sebab, kebanyakan orang Islam adalah petani dan buruh miskin tertindas yang menginginkan kebebasan nasional dari cengkeraman kolonial.

Meskipun ada pertentangan seperti itu, Tan Malaka tetap diangkat menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara pada pertengahan 1923, kemudian ia berangkat menuju Cina dan mendirikan Markas Besar di Kanton. Di tempat itu dia bertemu dan berkenalan dengan Sun Yat Sen serta sejumlah pemimpin Cina lainnya. Asia tenggara yang menjadi daerah tanggung jawabnya meliputi Burma, Siam, Annam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.

Pada bulan oktober 1925, pimpinan PKI waktu itu, Sardjono, Alimin, dan Muso mengadakan rapat gelap di Candi Prambanan, Yogyakarta. Mereka memutuskan pemberontakan melawan penindasan dan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Walaupun keputusan itu tidak disetujui oleh Tan Malaka

sebagai pimpinan tertinggi Komintern Asia, sebab menurut perhitungan perbandingan kekuatan dan keadaan, mengadakan pemberontakan waktu itu sama dengan bunuh diri bagi PKI, akhirnya pemberontakan PKI meletus juga di Jawa Barat pada bulan November 1926 dan di Sumatra Barat, Januari 1927. Namun yang terjadi hanyalah gejala kerusuhan kecil di tingkat lokal yang mudah dipadamkan dan ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda.

Melihat kenyataan seperti itu Tan Malaka melepaskan dan memisahkan diri dari PKI, dan hubungan dengan Komintern pun merenggang. Bersama temannya yaitu Subakat, Djamaludin Tamim, dan Budi Sucitro, yang sehaluan dan sejalan, Tan Malaka akhirnya menempuh jalan sendiri, bersikap, dan bertindak mandiri. Pada april 1925, Tan Malaka menulis buku Menuju Republik Indonesia. Buku aslinya ditulis dalam bahasa Belanda karena memang ditujukan kepada kaum terpelajar Indonesia yang akan menjadi calon pemimpin politik nasional masa datang, baik yang berada di tanah air maupun di Negeri Belanda. Tahun 1927, bersama Subakat dan Djamaludin Tamim, Tan Malaka memproklamasikan pendirian Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok. Partai ini bergerak di bawah tanah sebagai sarana perjuangan pendirian RI. Kemudian pada tahun 1932 Tan Malaka Berhasil masuk Hongkong dengan nama Ong Soong Lee, kemudian tertangkap oleh Polisi Rahasia Inggris. Setelah lebih kurang 2 ½ bulan ditahan dalam penjara Hongkong, Tan Malaka mendapat keputusan dikeluarkan ke Syanghai. Kemudian pada tahun 1936 ia mendirikan dan mengajar pada *School For Foreign Languages* di Amoy, Cina.

Tan Malaka merupakan tokoh promotor Persatuan Perjuangan yang mengikat persatuan antara sejumlah 141 organisasi terdiri dari pimpinan partai, serikat-serikat buruh, pemuda, wanita, tentara, laskar dan lain-lain, di atas dasar 10 program revolusi yang dikenal dengan nama 7 Pasal Minimum Program, menolak politik kompromi dengan imperialis Belanda yang dimulai dengan politik 1 November dan 3 November 1945. dan menentang politik kompromi Linggarjati pada tahun 1947 dan tahun 1948 dan Renville.<sup>15</sup>

Pada tahun yang sama pula Tan Malaka mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) yang melanjutkan Program Persatuan Perjuangan, dan melancarkan serangkaian Gerilya Pembela Proklamasi (GPP) yang berpusat di Jawa Timur. Dan karena gerakannya yang tidak setengah-setengah di dalam menentang bentuk-bentuk kolonialisme dan pemerintah waktu itu, maka pada tahun 1949 Tanggal 19 Februari napas terakhirnya direnggut ketika ia bersama-sama 20 orang pemuda pengawal ditembak mati di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di Desa Mojo, sebelah selatan kota Kediri, Jawa Timur. Penembakan itu atas perintah Letnan 1 Kolonel Surachmad dan Panglima dan TNI Jawa Timur Kolonel Soengkono, di saat beliau sedang memimpin revolusi melawan agresi Belanda, di saat itu pula para pemimpin pemerintahan pusat di Jogja sudah banyak yang ditangkap dan ditawan Belanda.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Tujuh butir itu adalah: 1) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%. 2) Pemerintah rakyat. 3) Tentara rakyat. 4) Melucuti tentara Jepang. 5) Mengurus tawanan bangsa Eropa. 6) Menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebun). 7) menyita dan menyelenggarakan perindustrian musuh, (*Dari Penjara ke Penjara*, hal 194).

<sup>16</sup>Susilo, Taufik Adi, *Tan Malaka; Biografi Singkat (1897-1949)*, (Jakarta: Garasi, 2008), hal 159.

## B. Mengenal Minangkabau

Daerah Minangkabau pada permulaan abad ini mengenal tiga paham yang pada umumnya berpengaruh pada diri penduduknya. Ketiga paham itu adalah paham Islam, Adat dan Kolonialisme serta berbagai implikasi yang dikandungnya. Ketiganya mempunyai pendukung walaupun para pendukung ini juga terpengaruh oleh ketiganya. Bentrokan paham, negosiasi dan saling memanfaatkan dari interaksi pendukung tersebut sering terjadi.

Daerah Minangkabau merupakan daerah terbuka dari lalu lintas Dunia Internasional untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi, agama dan budaya. Sifat pragmatis dari sebagian penduduk cepat mengambil manfaat dari perkembangan yang berlaku. Kemudian dalam mengambil manfaat dari administrasi perdagangan, administrasi pemerintahan dan juga dalam bidang pendidikan.

Bukit Tinggi menjadi pusat pendidikan se-Sumatera. Sekolah Raja, yaitu sekolah guru berbahasa Belanda *Kweek school* yang berada di kota itu merupakan tempat melatih pada tingkat menengah anak-anak Indonesia dari seluruh Sumatera. Sekolah ini adalah tempat penampungan bagi anak-anak kalangan bangsawan dan 17 orang-orang besar lainnya yang berada di pulau tersebut.<sup>17</sup>

Merantau merupakan bagian dari tradisi Minangkabau, sehingga kedudukan perantau begitu mulia dalam masyarakat tersebut. Pergi merantau, menurut visi falsafah Minangkabau dapat membuka mata untuk mengenal dunia luar yang luas, di mana mereka akan mendapatkan hal-hal baru yang nanti akan

---

<sup>17</sup>Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal 5-14.

dibawanya pulang. Merantau, bukanlah semata mencari uang atau harta, melainkan juga menuntut ilmu atau mengaji. Berdasarkan batasan ini, maka bisa dikatakan bahwa Tan Malaka adalah seorang perantau, baik fisik maupun mental (pemikiran).

Perantauan pertama yang dialami Tan Malaka ialah ketika dia meninggalkan Desa tempat lahirnya pergi menuntut ilmu ke “Sekolah Raja” di Bukit Tinggi. Walaupun masih berada di alam Minangkabau, tapi alam asalnya adalah Nagari Pandan Gadang. Sewaktu Tan Malaka tamat belajar di Bukit Tinggi, Tan Malaka diberi gelar Datuk Tan Malaka oleh kaum atau sukunya, sebagai kepala adat mereka. Ini berkaitan erat dengan ilmu yang diperolehnya selama merantau. Tidak lama sesudah itu, Tan Malaka pergi lagi melanjutkan studinya ke negeri Belanda, perantauan yang amat jauh bagi anak muda yang baru berumur 16 tahun. Ruang lingkup alamnya lambat laun berubah dari Nagari Pandan Gadang yang kecil meluas menjadi Minangkabau dan kemudian Indonesia. Modal tersebut dikembangkan oleh Tan Malaka untuk memahami, mengkaji dan menginterpretasikan permasalahan-permasalahan masyarakat Indonesia.

Visi adat dan falsafah Minangkabau dari merantau untuk mengontraskan atau membandingkan dunia rantaunya dengan realitas alam asalnya, sehingga dapat melihat mana yang baik dan yang buruk dari keduanya. Hal ini mengundang orang berpikir kritis dan dialektis. Oleh karena itu kontradiksi atau konflik dianggap wajar, terutama karena suasana tersebut akan selalu dapat diintegrasikan atau diselesaikan secara memuaskan atau harmonis melalui proses pemilihan



mana yang baik dan buruk dengan akal, yaitu kemampuan berpikir secara rasional. Dengan demikian, visi itu mendorong orang untuk berpikir secara kritis, dinamis atau dialektis. Cara berpikir demikian dengan sendirinya menolak dogmatisme. Karena menolak dogmatisme, maka dengan sendirinya menghendaki kebebasan berpikir.<sup>18</sup>

Dalam perantauan, mental Tan Malaka berhasil melepaskan diri dari keterikatan terhadap salah satu dari berbagai corak nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan berhasil melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bercorak lain, berbobot dan orisinal. Ini karena mempunyai idealisme untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia baru, menghargai kebebasan berpikir dan memiliki sikap kritis yang tajam serta mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri yang kuat sehingga mendorong untuk memiliki keberanian mengembangkan pemikiran sendiri.<sup>19</sup>

Minangkabau, meski terkenal sebagai wilayah yang kuat menganut Islam, siapa yang menyangka justru ideologi kiri seperti sosialisme dan komunisme terbentuk kuat di sana. Bahkan Agama Islam menjadi basis persemaian ideologi kiri di Minangkabau. Kebanyakan tokoh pergerakan kemerdekaan pernah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Agama.

Munculnya gerakan kiri radikal di Minangkabau berpangkal di sekolah menengah agama di Padang Panjang (Sumatera Thawalib dan Diniyah), Padang (Adabiyah dan Islamic College), dan Bukit Tinggi (Sumatera Thawalib Parabek).

---

<sup>18</sup>Alfian, *Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal 140141.

<sup>19</sup>Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: LP3ES, 1982), hal 9-11

Koalisi Islam dan Sosialisme serta Komunisme itu didukung oleh motif yang sama untuk membebaskan diri dari kolonialisme, di sinilah Tan Malaka berperan menghubungkan kedua arus tersebut.<sup>20</sup>

Sistem pendidikan di Minangkabau juga merupakan termaju di Hindia Belanda setelah pulau Jawa pada tahun 1920-an, muncul sejumlah intelektual Minangkabau yang bukan hanya hidup di kampung tapi menyebar di seluruh Sumatera, Jawa, Belanda, Malaysia dan Singapura dan Tan malaka adalah salah satunya.

### C. Karya-karya Penting Tan Malaka

Tan Malaka sebagaimana yang sudah diketahui, termasuk penulis yang cukup produktif dalam menuangkan alam pikirannya. Berikut ini adalah karya-karyanya:<sup>21</sup>

Karya penting Tan Malaka yaitu *Gerpolek* (Gerilya, Politik, Ekonomi). Ditulis di penjara Madiun 1948. Berisi tentang ajarannya dalam melakukan gerilya politik maupun ekonomi dan menjelaskan tentang cara bergerilya dalam politik dengan strategi militer, maupun dengan penguatan ekonomi dengan merebut seluruh kekayaan asing. Keduanya menjadi satu dan saling menguatkan.<sup>22</sup> Dalam buku ini Tan Malaka benar-benar memaparkan bagaimana melawan penjajah Belanda, buku ini juga menjelaskan bahwa pentingnya persatuan rakyat untuk

---

<sup>20</sup>Susilo, Taufik Adi, *Tan Malaka Biografi...*, hal 14.

<sup>21</sup>Rambe, Safrizal, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian Terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis" Jalan Penghubung Memahami Madilog*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), hal 56-71.

<sup>22</sup>Rambe, Safrizal, *Pemikiran Politik*, hal 57-71.

membangun kekuatan masa yang nantinya akan menggilas penjajah Belanda. Aura perjuangan begitu terasa setelah membaca buku ini, Tan Malaka juga memaparkan bahwa pentingnya merdeka 100% dimana hak-hak kita yang dirampas oleh penjajah seperti alat produksi dan lain-lain semua dikembalikan kepada rakyat Indonesia, dengan begitu revolusi Indonesia benar-benar tercipta. Tan Malaka juga menjelaskan bahwa ekonomi sosialislah yang tepat diterapkan di Indonesia ini. Gerilya politik ekonomi (Gerpolek) adalah buku yang ditulisnya dipenjara setelah perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Karya terbesar Tan Malaka lainnya adalah *Materialisme, Dialektika dan Logika. Dari Pendjara ke Pendjara*, ditulis pada tahun 1946-1947 di Penjara Ponorogo, yang berisi tentang riwayat hidup (otobiografi). Ia menguraikan perjalanannya dari suatu negara ke negara lain untuk menghindar dari kejaran agen-agen kolonial. Ia juga memaparkan pandangan tentang kepercayaan, filsafat dan tentang negara. Dari buku inilah kebanyakan para pemerhati mendapat gambaran kehidupan Tan Malaka yang revolusioner.

*Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia), diterbitkan di Canton, April 1925. Berisi tentang uraiannya akan kondisi Dunia, pertentangan dua sistem antara Kapitalisme dan Komunisme yang diyakininya akan dimenangkan oleh Komunisme. Dilanjutkan dengan situasi di Indonesia di mana penjajah Belanda melakukan penjajahan dengan biadab, namun Tan Malaka yakin suatu saat penjajah akan kalah apabila semua organisasi perjuangan yang ada terutama PKI, dapat menyusun tujuan revolusionernya.

Selain karyanya yang besar Tan Malaka juga banyak menulis beberapa brosur diantaranya *Massa Aksi*, ditulis di Singapura tahun 1926. Secara umum brosur ini berisi tuntutan bagaimana melakukan sebuah revolusi di Indonesia. Sebuah revolusi terutama di Jawa dan Sumatera adalah sesuatu yang tak dapat dihindarkan, baginya tidak ada sikap yang netral, yang ada adalah berpihak pada penjajah Belanda atau rakyat terjajah Indonesia.

Dari sini kemudian baru Tan Malaka beralih pada bagaimana menjalankan revolusi yang benar, tidak bisa dicapai oleh pemberontakan atau kudeta secara anarkis. *SI Semarang dan Onderwijs*, Ditulis di Semarang tahun 1921 pada saat Tan Malaka berusaha merumuskan tujuan pendidikan dari sekolah Serikat Islam yang mulai dibangunnya (dikenal juga dengan sekolah Tan Malaka). Berisi pokok-pokok pikiran yang akan dikembangkan/diajarkan dalam sekolahnya. Kemudian tulisan-tulisan beliau yang lain diantaranya; *Asia Bergabung* (Gabungan Aslia), Ditulis tahun 1943, walaupun menurut Poeze hanya selesai separuh, *Semangat Moeda*, ditulis di Manila tahun 1926, namun oleh Tan Malaka dikatakan di Tokyo sebagai tempat penerbitanya, *Politik*, ditulis di Surabaya pada tanggal 24 November 1945 berisi tentang percakapan antara Godam (simbolisasi kaum buruh), Pacul (petani), Toke (pedagang), Den Mas (ningrat) dan Mr. Apal (wakil kaum intelektual). Menguraikan tentang bagaimana caranya merdeka, maksud dan tujuan kemerdekaan, serta bagaimana mengisi kemerdekaan itu dan yang tak kalah penting adalah Indonesia Merdeka harus berdasarkan sosialisme, *Rentjana Ekonomi*, ditulis di Surabaya pada tanggal 28 November 1945 menguraikan tentang percakapan dengan simbolisasi yang sama

seperti yang ada dalam tulisanya *Politik*. menerangkan tentang rencana pembangunan ekonomi, yang menurutnya ekonomi sosialislah yang dapat membawa kemakmuran bagi Indonesia kelak, *Moelihat*, ditulis di Surabaya pada tanggal 2 Desember 1945 Berisi tentang percakapan dengan simbolisasi yang sama seperti yang ada dalam *Politik* yaitu menguraikan tentang strategi dan taktik dalam perjuangan untuk membawa Indonesia ke arah kemerdekaan, *Manifesto PARI* (Manifesto Jakarta), ditulis di Jakarta tahun 1945. Menguraikan tentang pertentangan sistem yang ada di Dunia, antara Kapitalisme dengan Komunisme yang menurutnya akan dimenangkan oleh komunisme serta penolakan atas percobaan pendirian Republik Indonesia yang kapitalis dan membatalkan semua upaya dari luar untuk menjajah kembali Indonesia dengan cara apa pun, *Thesis*, ditulis tahun 1946 di Lawu. Berisi tentang ajarannya mengenai pembentukan Negara sosialis. Uraian tentang perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia seratus persen. Juga pembelaannya terhadap tuduhan Trotskys yang selalu dituduhkan kepadanya, berkenaan dengan pemberontakan PKI 1926 yang gagal dan oleh pihak PKI kegagalan itu selalu dialamatkan kepada Tan Malaka sebagai orang yang menyabotnya, *Koehandel Di Kaliurang*, ditulis tanggal 16 April 1948 dengan nama samaran Dasuki. Berisi tentang penolakan terhadap perjuangan diplomasi yang tidak berprinsip, yang dilakukan oleh pemerintah saat itu.

Perjuangan lewat diplomasi hanya akan merugikan Indonesia dan menjual Indonesia kepada kaum kapital asing, oleh karena itu perundingan harus dibatalkan atau dihandel dan mempersiapkan kaum MURBA untuk berjuang, *Surat Kepada Partai Rakyat*, ditulis 31 Juli 1948 di penjara Magelang sebagai

sambutan tertulis dalam pembentukan Kongres Partai Rakyat tanggal 10-11-12 Agustus 1948 berisi tentang bagaimana mengorganisasikan Partai Rakyat agar menjadi partai yang memperhatikan dan memperjuangkan rakyat MURBA, *Proklamasi 17-8-1945, Isi dan Pelaksanaannya*, Pidato tertulis pada Kongres Rakyat Indonesia Desember 1948. Berisi tentang penolakan perundingan yang dilakukan Indonesia saat itu dan persiapan perang kemerdekaan dalam menghadapi agresi militer Belanda, *Uraian Mendadak*, merupakan salinan tertulis dari pidato yang diucapkan di depan Kongres peleburan tiga partai (Partai Rakyat, Partai Buruh, dan Partai Rakyat Jelata) menjadi Partai Murba. Berisi tentang reorganisasi partai dan uraian untuk tetap mempertahankan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Karya-karya tulis Tan Malaka meliputi semua bidang kemasyarakatan dan ke-Negaraan-politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran, terlihat benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an, serta benang merah orisinalitas, kemandirian, kekonsekuenan, dan konsistensi yang dirasa jelas dalam gagasan-gagasan dan perjuangan implementasinya dalam rumusan konseptual dan penjabaran operasionalnya.<sup>23</sup>

Dari tulisan-tulisan itulah siapa pun kini bisa mengenal dan menyelami gagasan-gagasan Tan Malaka. Siapa pun bisa dengan leluasa membedah apa yang sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian Tan Malaka. Dan mereka akan dengan mudah mendapatkan ciri khas gagasan-gagasannya, yaitu selalu

---

<sup>23</sup>Kata Pengantar Wasid Suwanto, *Memperkenalkan Tan Malaka, Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang Paling Tidak Dikenal*, dalam Tan Malaka, *Madilog*, (Jakarta: Pusat Data Indikator, 1999), hal xiii-xvi.

berlandaskan cara berpikir ilmiah, berdasarkan ilmu bukti, mengutamakan Indonesia, memandang jauh ke depan, serta mandiri, konsekuen, dan konsisten. Penulis beranggapan bahwa karya-karya Tan Malaka yang benar-benar bisa mewakili itu semua terangkum jelas pada buku *Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi)* yang di tulisnya ketika ia berada dalam penjara di Madiun pada tahun 1948. Dalam buku ini Tan Malaka mencoba me reviuw ulang tentang konsep atau cara bergerilya dalam melawan penjajah, cara bernegosiasi dalam berpolitik dan cara menjalankan ekonomi Indonesia pasca kolonial. Yang menjadi garis besar dalam tulisan ini Tan Malaka anti bernegosiasi apapun terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka menginginkan kemerdekaan 100% dengan cara bergerilya dan merebut kembali alat produksi yang dimiliki oleh kolonial. Dengan begitu kita merdeka 100% menurut Tan Malaka, apabila kemerdekaan tidak bisa mengembalikan alat-alat produksi yang dimiliki oleh penjajah maka ini adalah kemerdekaan semu. Maka tawaran Tan Malaka adalah Gerilya Politik dan ekonomi.











## B. Pemikiran Politik Tan Malaka

Tan Malaka dalam melihat revolusi Indonesia tak jauh berbeda dengan para *founding fathers* lainnya seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan lain-lain. Ia melihat revolusi Indonesia tidak berhenti pada revolusi politik semata-mata namun melihatnya sebagai revolusi yang lebih global sifatnya, mulai dari revolusi penghapusan feodalisme, revolusi kemerdekaan dan revolusi sosial yang isinya harapan terhadap hadirnya masyarakat adil dan makmur. Untuk sebagian besar *founding fathers* kita, diartikan sebagai penolakan terhadap kapitalisme.

Bagi kita yang hidup di awal abad 11, tentu gagasan ini terdengar aneh, apalagi ketika kita menyaksikan kebangkrutannya komunisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur, serta mulai mengglobalnya kapitalisme di dunia sebagaimana yang dikatakan Francis Fukuyama, namun satu abad yang lalu tidaklah demikian. Komunisme baru berhasil mengkonsolidasikan dirinya di Uni Sovyet, dan sebagai ideologi yang memposisikan dirinya sebagai lawan dari kapitalisme yang melahirkan imperialisme, tentu ini menjadi daya tarik bagi pejuang-pejuang kemerdekaan di negara-negara terjajah.

Di Indonesia hal demikian juga terjadi walaupun tidak selalu harus komunisme, dan juga banyak yang menganut sosialisme non radikal. Penolakan terhadap kapitalisme sebenarnya bukan hanya khas Tan Malaka, juga Bung Karno, Hatta, Sjahrir, bahkan sampai Tjokroaminoto harus menyatakan islam itu juga sosialis (dalam bukunya *Islam dan Sosialisme*), ketika terjadi konflik antara





Di Indonesia semua itu tercakup dalam kebhinneka tunggal ikaan Pancasila dan UUD 1945 pasal 33, perbedaan dari berbagai variasi sosialisme itu terletak pada strategi, taktik, metodologi, titik-tolak cara berfikir, filsafat, dan ideology masing-masing.

### C. Pemikiran Ekonomi Tan Malaka

Tan Malaka mengatakan: “Sejarah masyarakat manusia diseluruh dunia sekarang sedang menuju masyarakat komunis”. Sebelumnya, didalam masyarakat kapitalis terjadi pertentangan diantara kerja bersama oleh yang tak mempunyai melawan milik perseorangan yang mempunya. Kita sedang menuju kepada masyarakat komunisme modern yang (seperti masyarakat sosialisme) berdasarkan kerja bersama dan milik bersama atas alat dan hasil produksi.<sup>31</sup> Inilah revolusi sosial yang di idam-idamkan oleh Tan Malaka dalam usaha memakmurkan Indonesia.

Revolusi nasional yang tengah berlangsung dan dapat dimasukkan revolusi sosial kedalamnya, adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan, revolusi nasional adalah bingkainya dan revolusi sosial adalah isinya.<sup>32</sup> Namun dalam implementasinya hanyalah merupakan strategi dan masalah titik berat, yang tentunya pada permulaan lebih memberikan tekanan pada revolusi nasional.

---

<sup>31</sup>Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara*, hal. 73

<sup>32</sup>Senada dengan Tan Malaka, Sjahrir mendivinisikan gerakan revolusioner sebagai gerakan yang tidak sekedar mencapai kemerdekaan melainkan menciptakan revolusi sosial. Dalam kata-katanya ditegaskan, ”gerakan rakyat adalah gerakan untuk mencapai emansipasi rakyat Indonesia, yakni jutaan orang yang tidak memiliki tanah yang tak ingin menjadi kapitalis, para petani dan buruh, golongan kromo dan marhean. Gerakan rakyat mengabdikan kepada penentuan nasib sendiri secara mutlak, yaitu kemerdekaan yang sejati dan kesempatan untuk bergerak menuju ke revolusi sosial pada akhirnya. Lihat, Eko Prasetyo, *Islam Kiri*, hal. 185

Baru setelah kemerdekaan 100% dapat di raih, maka maximum program selanjutnya adalah menuju masyarakat sosialisme Indonesia, dan ini harus diupayakan. Hanya saja, Tan Malaka mengakui dalam iklim revolusi fisik yang sedang berlangsung. Ini, tidaklah arif kalau kita mengedepankan maximum program itu.<sup>33</sup>

Dalam penerapannya pun, Tan Malaka mengatakan untuk tetap memperhatikan kondisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang dinyatakan olehnya; “sosialisme 100% bisa dijalankan, adalah tergantung kekuatan lahir batin bangsa Indonesia sendiri dan keadaan disekitar Indonesia”. Tentang bentuk perekonomian yang bagaimana ditawarkan Tan Malaka pada rakyat Indonesia, Tan Malaka tampaknya yakin bahwa ekonomi sosialislah yang menjadi idaman rakyat Indonesia dikemudian hari. Menurut keyakinannya, pengelompokan politik yang ada di Indonesia, seperti Islam yang mewakili kaum tani, nasionalais yang mewakili kaum borjuisi tengah serta sosialis yang mewakili kaum proletar, yang pada saat memperjuangkan kemerdekaan bahu membahu mengusir kolonialisme Belanda, namun setelah kemerdekaan tercapai bisa saja mengalami polarisasi, dan konflik satu sama lainnya pun timbul.<sup>34</sup>

Dalam upaya membangun perekonomian Indonesia, di dalam brosur “*Rentjana Ekonomi*” yang ditulisnya tahun 1945, Tan Malaka menawarkan sebuah konsep rencana ekonomi untuk diterapkan dalam konteks negara Indonesia. Ekonomi sosialis menurutnya adalah rencana ekonomi yang dapat menolong rakyat *Murba* Indonesia keluar dari cengkraman kapitalisme yang telah

---

<sup>33</sup>Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, hal. 27

<sup>34</sup>Ibid,



menyengsarakan bangsanya selama ber abad-abad, dan ini segera dilenyapkan dari Indonesia. Kapitalisme dalam pertumbuhannya hanya akan terakumulasinya modal pada kaum kapitalis yang jumlahnya sedikit, dan sebagian besar lainnya yaitu rakyat *murba* hanya akan menikmati sebagian terkecil dari jumlah modal tadi. *Surplus values* (nilai lebih) yang dikemukakan oleh Marx menurutnya adalah perampokan yang dilakukan oleh kapitalis terhadap hak rakyat Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).<sup>35</sup>

Inilah kritik terhadap perekonomian dunia yang menurutnya perekonomian yang berdasarkan kapitalisme, demokrasi dan fasisme.<sup>36</sup> Tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.<sup>37</sup>

Kritik pertamanya di mulai terhadap rencana ekonomi kapitalis, “kapitalisme merampok” ini adalah makian Tan Malaka terhadap cara kerja kapitalis dalam upaya melipat gandakan kapitalnya. Di dalam masyarakat kapitalisme dimana industri banyak ditemukan, disana lah *Surplus Values* (nilai lebih) yang dikemukakan oleh Marx berlaku menurut Tan Malaka. *Surplus Values* inilah hasil rampokan dari tenaga rakyat Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA) yang telah menguntungkan oleh kapitalis. Tan Malaka mencontohkan *Surplus Values* (nilai lebih) dan cara kerjanya sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Ibid, hal 228-229

<sup>36</sup>Sifat khas fasisme adalah dianutnya doktrin organis menegnai negara. Bahwa negara dipersamakan (dianalogikan) sebagai makhluk hidup yang mempunyai “*political will*” sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksanaan fungsi negara. Negara dan pemerintah sebagai organ pelaksana kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat. Lihat. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, hal. 69

<sup>37</sup>Ibid,



Jadi “untung” Rp. 750,- Rp. 675,- = Rp. 75,-

Untung yang didapat si kapitalis ini jelas berasal dari tenaga buruh yang telah didapatkannya tadi. Inilah *Surplus Values* (nilai lebih) Marx yang dipercaya oleh Tan Malaka.<sup>38</sup>

Tan Malaka menganggap bahwa kapitalisme suatu saat akan mengalami krisis. Ini dinyatakannya dengan apabila seluruh kekuatan kapitalis yang ada, dalam usahanya meraih keuntungan yang besar maka berlomba-lomba untuk memproduksi barang dalam jumlah banyak. Si kapitalis A, kapitalis B, kapitalis C dan yang lain-lainnya, memproduksi barang dalam jumlah yang besar, pada waktu yang bersamaan melebihi jumlah permintaan, ini sesuai dengan hukum ekonomi yang menyatakan bahwa permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) haruslah seimbang. Kalau penawaran (*supply*) melebihi jumlah permintaan (*demand*) maka yang terjadi adalah over produksi. Sebagai akibatnya maka barang melimpah dan bertumpuk di gudang-gudang, harga pun turun dan untung merosot. Pabrik terpaksa tutup sebab tidak menguntungkan lagi dan pengangguran memuncak. Para pedagang juga berhenti berdagang, dan para bankir pun menuntut piutang. Apabila ini terjadi maka krisis dalam kapitalis pun akan terjadi, yang pada gilirannya akan membawanya kepada kehancuran.<sup>39</sup> Dalam kondisi inilah Tan Malaka menamakannya produksi anarhistis, inilah yang menjadi biang keladi krisis tersebut.

Dalam perekonomian liberal klasik sebagaimana yang ditunjukkan Tan Malaka dengan merujuk kepada pendapat Marx, setiap individu merdeka untuk

---

<sup>38</sup>Ibid, hal. 235

<sup>39</sup>Ibid, hal. 240

berproduksi sesukanya, menurut kaum kapitalis, maka hasrat mencari untung (*profit motive*) adalah hak setiap individu, dan ini diperkuat dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa *pertama*, kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar (bebas) dengan instrument harga sebagai penanda (sinyal).

Jika harga dianggap melebihi biaya produksi dan margin laba, maka itu merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke pasar untuk menambah persediaan (*supply*) barang atau jasa sehingga dapat menurunkan harga: demikian sebaliknya. *Kedua* setiap individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (*property rights*) sebagai dasar melakukan transaksi (*exchange*). Tanpa adanya hak kepemilikan, individu tidak akan pernah bisa mengenksekusi kegiatan ekonomi (transaksi). *Ketiga* kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik factor produksi, yakni pemodal (*capital*) tenaga kerja (*labor*), dan pemilik lahan (*land*).

Pemilik modal memperoleh pendapatan dari laba (*profit*), tenaga kerja dari upah (*wage*), dan pemilik lahan dari sewa (*rent*). *Keempat*, tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar (*free entry and exit barriers*).<sup>40</sup> Ini adalah fondasi pertama dalam kapitalisme klasik yang dinyatakan oleh Tan Malaka sebagai model kapitalisme *laissez faire*.

Namun menurut Tan Malaka sistem tadi hanya akan menyebabkan siapa kuat secara modal maka itulah yang akan bertahan. Yang kedua, sistem itu akan memberikan pendapatan baru dan yang ketiga sistem ini pada akhirnya semakin

---

<sup>40</sup>Ismail, *EKONOMI POLITIK: Sebuah Teori dan Aplikasi*, hal. 69-70

mengekalkan perbezaan yang mencolok antara kelas bourjuis dan kelas proletar. Pembagian hasil produksi yang tidak sama dimana buruh hanya mendapatkan upah yang kecil, pada akhirnya membuat kondisi buruh tidak akan pernah menjadi lebih baik dan hidup terus dalam serba kekurangan. Dalam suasana masyarakat yang seperti ini, di mana masyarakat terbelah dua antara kelas bourjuasi dan kelas proletar maka barang yang banyak dihasilkan menjadi over produksi.<sup>41</sup>

Kelas bourjuasi tidak habis mengkonsumsi, sementara kelas proletar tidak mempunyai kemampuan membeli. Sebagai puncak dari produksi anarchistic itu adalah persaingan hebat antara satu kapitalis dengan kapitalis lain dalam satu negara, dan selanjutnya persaingan antara satu negara kapitalis dengan negara kapitalis yang lainnya. Tiap-tiap negara kapitalis berlomba-lomba menanamkan modal di negara yang lemah atau negara dunia ketiga, lalu memonopoli hasil buminya untuk perindustrian negara kapitalis tersebut. Perlombaan ini akhirnya memunculkan imperialisme dan perang imperialisme antara satu negara kapitalis dengan negara kapitalis lainnya, untuk memperebutkan tanah jajahan. Dan produksi anarchistic ini berakhir pada peperangan imperialisme.<sup>42</sup>

Pendapat Tan Malaka yang terakhir tentang imperialisme tadi, penulis kira merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Lenin. Menurut Marx dalam fase kapitalis dikarenakan adalah kontradiksi-kontradiksi dalam fase tersebut, maka kapitalisme akan lenyap. Namun yang terjadi tidaklah demikian, Marx salah meramalkan kapitalisme, seperti yang kemudian dilihat oleh Lenin bukannya lenyap namun justru semakin menguat sejak abad ke-19. Lenin dalam bukunya

---

<sup>41</sup>Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, hal. 232

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 232

“*Imperialism The Highest Stage of Kapitalism*” mengatakan kontradiksi-kontradiksi dalam tubuh kapitalisme, nantinya akan diselamatkan lewat imperialisme, dan krisis tersebut diekspor oleh negara kapitalis ke negara-negara terjajah.

Kalau dalam pendapat Marx produksi yang over tadi sebagai penyebab krisis, maka kelebihan produksinya di ekspor ke negara-negara terjajah tadi sebagai pangsa pasar baru. Siklus penindasannya pun berubah, tidak lagi seperti apa yang ada dalam kapitalisme klasik melalui penindasan majikan terhadap buruh dan pabrik. Namun dia berkembang melalui penindasan negara kapitalis terhadap negara terjajah atau negara dunia ketiga.<sup>43</sup>

Dalam konteks ini berlakulah “*The World Sistem Theory*” yang dikenal dalam sosiologi, yang merupakan teori turunan dari teori Marxis. Menurut teori ini buruh-buruh di dunia ketiga sebenarnya ditindas dua kali, yaitu oleh kapitalis dalam negeri dan juga kapitalis-kapitalis negara-negara maju. Seluruh industri-industri besar yang ada di negara-negara dunia ketiga umumnya merupakan penanaman modal asing yang dimiliki kaum kapitalis negara maju. Seluruh industri-industri besar yang ada di negara-negara dunia ketiga umumnya merupakan penanaman modal asing yang dimiliki kaum kapitalis negara maju. Namun kaum kapitalis tersebut sengaja membuka pabriknya di negara-negara dunia ketiga, ketimbang membuka pabrik di negara maju. Di negara dunia ketiga harga ongkos buruh dalam memproduksi sebuah barang jauh lebih murah, ketimbang di negara-negara maju. Dengan demikian memproduksi barang di

---

<sup>43</sup>Sebagaimana yang dikutip oleh Edi Maryadi, *Semesta Tan Malaka*. Hal. 19



pengelolaan negara. Seperti yang dikemukakan oleh para penggagas demokrasi diantara Jhon Locke, J.J. Rousseau dan Montesqueu, maka kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, penguasa berkuasa setelah penguasa tersebut memperoleh kekuasaannya lewat kepercayaan rakyat yang lebih dikenal dengan teori perjanjian sosial (*social contract*).

Sedangkan adanya undang-undang yang mengatur hak dan kekuasaan adalah ciri dari sebuah negara demokrasi. Tan Malaka mengatakan hak dan kekuasaan tersebut dibagi-bagi kedalam: *pertama*, antara rakyat dan pemerintah. *Kedua*, pemisahan kekuasaan dalam tiga badan yang terpisah yang lebih dikenal dengan Trias Politika. Asumsi dasarnya adalah pemisahan badan tersebut berguna untuk mencegah terjadinya praktek-praktek otoriter, di mana kekuasaan terpusat pada satu tangan saja.

Kekuasaan ini terbagi kedalam, kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau menjalankan undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. *Ketiga*, antara masing-masing negara bagian dengan negara federal (Amerika Serikat menganut paham federasi).<sup>45</sup> Oleh karena itu di Amerika Serikat pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam perekonomian, perekonomian secara langsung dikendalikan oleh pasar.

Setelah menguraikan beberapa konsep ekonomi kapitalis dan sosialis serta bentuk-bentuk kapitalisme di sebuah negara demokrasi, tibalah Tan Malaka pada uraian rencana ekonomi sosialis, inilah bentuk yang sebenarnya diidam-idamkan oleh Tan Malaka. Namun sebelum menguraikannya lebih jauh, ia mengemukakan

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 64-65



terlebih dahulu kondisi sosial politik negara Rusia yang mempraktekkan perekonomian sosialis tersebut. Di Rusia seperti dinegara-negara kapitalis yang lain seperti inggris. Rusia tidak memiliki kelas menengah yang selama ini dikenal sebagai kelas borjuasi yang dapat menjadi penggerak praktek perekonomian kapitalistik. Ketiadaan kelas menengah ini, dapat berfungsi sebagai pendorong bagi Rusia dalam mempraktekkan sosialisme.

Tidak ada kelas menengah berarti tidak ada tidak ada kelas penghalang bagi usaha untuk memproletarkan semua golongan masyarakat yang ada di Rusia. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang tentunya juga amat berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang tentunya juga amat berkaitan dengan masalah mekanisme perencanaan bangunan, Rusia juga berlainan dengan negara-negara kapitalis demokratis. Kalau negara-negara kapitalis demokratis penyelenggaraan kekuasaan negara diatur menurut prinsip-prinsip Trias Politica, yang ditandai dengan pembagian kekuasaan berdasarkan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Namun di Rusia tidaklah demikian, di Rusia menurut Tan Malaka secara prinsip memang kekuasaan dibagi kedalam tiga kekuasaan sebagaimana lazimnya yang ada dinegara-negara demokratis. Tetapi pembagian tersebut tidaklah menganut perbedaan lembaga kekuasaan negara, karena Rusia mengenal stau partai tunggal yaitu Partai Komunis. Dalam Partai Komunis inilah pembagian kekuasaan menyusun rencana pembangunan, menjalankan rencana pembangunan dan mengawasi rencana pembangunan dilakukan.<sup>46</sup>

---

Setelah menjelaskan hal tersebut, kemudian Tan Malaka beranjak kepada sistem perekonomian sosialis, yang ditawarkannya untuk menjadi sistem perekonomian yang dapat dipakai oleh bangsa Indonesia. Namun sebelum jauh melangkah Tan Malaka kembali mengingatkan apa yang dimaksud dengan rencana ekonomi tersebut sebagai dasar dari sosialisme. Menurutnya perekonomian tersebut harus diatur secara terencana tidak anrchis seperti dalam kapitalisme. Produksi harus diseimbangkan dengan pemakaian. Dengan demikian krisis dapat dihindarkan, sedangkan dasarnya menurut Tan Malaka adalah persamaan sosial dan tolong menolong yang merupakan fondasi dari sosialisme.<sup>47</sup> Untuk itu maka Tan Malaka menyatakan haruslah ada lembaga (yaitu didalam Partai Komunis) yang berfungsi untuk menaksir rencana perekonomian tersebut.

Untuk lebih spesifikasinya Tan Malaka menyatakan jumlah keseluruhan produksi yang ada setelah dinominalkan haruslah sesuai dengan jumlah keseluruhan gaji warga negara. Makin tinggi gaji makin bisa ditinggikan jumlah produksi, makin rendah gaji makin susah untuk menaikkan jumlah produksi. Kemudian rencana kedua yang harus di ingat adalah, sebelum kita menguasai industri menengah, sulitlah bagi kita untuk masuk kedalam industrialisasi berat. Artinya, sebelum kita melangkah maju kearah negara industry besar yang mampu memproduksi mesin-mesin berat, kita haruslah mampu menguasai industri menengah dan ringan. Setelah itu terjadi, baru rencana selanjutnya adalah

---

<sup>46</sup>Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, hal. 242

<sup>47</sup> Tan Malaka, *Rentjana Ekonomi*. Hal. 91









pendapatan. Penderitaan rakyat bertambah besar lebih-lebih karena *Gubernemen* membebankan pajak yang lebih berat kepada rakyat.<sup>52</sup>

Perkembangan politik kolonial Belanda adalah politik kolonial *konservatif* tahun 1800-1848, *cultuurstelsel* tahun 1830-1870, permulaan politik kolonial liberal tahun 1850-1870 dan politik etis tahun 1900, yakni edukasi, irigasi dan emigrasi. Tan Malaka lahir pada akhir abad ke-19, ketika diberlakukannya politik etis Belanda. Politik etis ini merupakan politik balas budi bangsa Belanda kepada Hindia Belanda oleh keuntungan yang diperolehnya selama dasawarsa-dasawarsa yang lalu.<sup>53</sup>

Kebijakan politik ini adalah terbukanya kesempatan yang makin luas di kalangan pribumi untuk memperoleh pendidikan modern ala Belanda. Pendidikan ini juga untuk memenuhi kebutuhan atas tenaga-tenaga terdidik untuk birokrasi. Dari sinilah munculnya beberapa intelektual muda yang bersentuhan dengan pemikiran Barat, termasuk tentang Nasionalisme.<sup>54</sup>

## 2. Alam Pikiran Barat

Kelak pada perkembangan kehidupannya Tan Malaka memiliki pandangan bahwa Islam memiliki kekuatan revolusioner dan dapat menjadi alat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dengan melakukan pembelaan dan

---

<sup>52</sup>A. Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 146.

<sup>53</sup>A. Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah...*, hal 8-30.

<sup>54</sup>Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia* Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal 5 & 43.

menganjurkan PKI untuk bekerja dengan Serikat Islam.<sup>55</sup> Di bidang agama perhatiannya besar sekali pada soal-soal mistik; tetapi di bidang sosial ia sudah memilih gagasan komunisme.

Kepergiannya ke negeri Belanda bisa disebut sebagai jendela awal perkenalannya pada dunia luar. Berkenalan dirinya dengan paham sosialisme dan menjadikannya berkenalan dengan pemikiran Nietzsche dan karya-karyanya Th. C. Arlyle, hal tersebut yang membuatnya berada dalam semangat dan paham revolusioner.<sup>56</sup>

Selanjutnya adalah persentuhan pemikiran Tan Malaka dengan berbagai kalangan sampai para aktivis, pemikir dan tokoh dunia Barat. Dengan didukung modal minat, semangat dan kecerdasan yang dimilikinya untuk belajar, Tan Malaka membawa banyak buku ketika menjalankan masa pembuangan yang pertama, dari Indonesia pada 22 Maret 1922. Buku-buku tersebut tentang Agama, Alquran dan Bibel, Budhisme, Konfusianisme, Darwinisme, ekonomi liberal, sosialis atau komunistis, buku politik dari liberalisme sampai komunisme, riwayat dunia, ilmu perang dan buku sekolah dari ilmu berhitung sampai ilmu mendidik. Tan Malaka juga giat mengumpulkan buku-buku baru sewaktu di Tiongkok dan Indonesia, jaringan pergaulan, berorganisasi ditambah kemampuan penguasaan bahasa yang banyak, menjadi bekal perjuangannya di dalam maupun luar negeri. Menurut pengakuan Tan Malaka, ia menguasai berbagai bahasa seperti, Belanda, Jerman, Inggris, Melayu, Jawa, Perancis, Tagalog, Siam, dan

---

<sup>55</sup>Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Pergulatan Menuju*, hal 305-306.

<sup>56</sup>Fitri R. Ghazally, *20 Tokoh Nasional Abad 20*, (Jakarta: Penerbit Progress, 2004), hal 57-58.







pemupukan modal dan akumulasi kekayaan di masyarakat. Hal ini yang semakin lama semakin menciptakan kesenjangan di antara berbagai golongan atau kelas di masyarakat, yaitu kaum kaya dan kaum miskin, kaum tani dan kelompok industrialis. Kelompok pekerja dan kelompok majikan, kelas pengusaha dan kelas buruh. Ini adalah analisis ekonomi politik, yaitu keterkaitan mendalam antara hubungan-hubungan sosial ekonomi dengan kekuasaan dan politik.

Analisis ekonomi politik sangat cocok dalam menjelaskan situasi di Indonesia setelah krisis. Dan sebenarnya juga mampu menjelaskan situasi Indonesia sebelum krisis, maupun prediksi Indonesia pasca krisis. Akan tetapi pendekatan ini bertabrakan dengan ilmu ekonomi ortodoks (economics). Ilmu ekonomi ortodoks bersifat sangat positivis, tidak menjelaskan kepentingan-kepentingan golongan atau kelas, mengabaikan hubungan-hubungan sosial ekonomi, dan hanya bicara secara agregat saja (besaran umum). Karena itu juga bersifat doktriner, yaitu melalui konsep pertumbuhan ekonomi, yang dianggap merupakan resep pokok berjalannya sistem ekonomi. Doktrin ekonomi ortodoks adalah pertumbuhan ekonomi dalam mekanisme pasar bebas. Tidak dipermasalahkan siapa yang tumbuh dan siapa yang dirugikan, karena mekanisme pasar bebas yang akan mengatur dengan sendirinya. Doktrin ini semakin bersifat fundamentalis dengan menguatnya Neo Liberalisme. Mereka adalah golongan ekonom yang sangat percaya bahwa ekonomi pasar harus bersifat sebebas-bebasnya. Sebuah free fight liberalism (liberalisme pertarungan bebas). Liberalisme ekonomi memang akan melahirkan korban-korban dan pemenang-pemenang. Hal itu tidak menjadi soal. Ini adalah kembali ke masa awal

pertumbuhan kapitalisme, yang tidak diregulasi dan dibatasi. Dan seperti pada masa itu, tumbuh pula ekonomi politik sebagai penentangannya. Jadi masa kini juga memperlihatkan bahwa ekonomi Neo Liberal akan mendapat tentangan dari pendekatan ekonomi politik.<sup>58</sup>

Doktrin Neoliberalisme adalah kembali kepada prinsip “Laissez-Faire” (kompetisi bebas) yang ekstrim, yang menyerahkan sepenuhnya sistem perekonomian kepada kehendak dan mekanisme pasar bebas, tanpa mengindahkan konteks dan keberagaman situasi ekonomi berbagai negara, yang lebih banyak tidak siap atau tidak cocok melakukannya. Pasar bebas menjadi hukum universal pengaturan ekonomi. Bahkan kalau demokrasi menghalanginya, maka lebih baik menyingkirkan demokrasi. Paham ini sekarang juga dipeluk oleh para ekonom mainstream di setiap negara, sehingga ekonom-ekonom ini justru ikut serta menggerogoti negaranya sendiri, dan menjadi corong saja dari kepentingan badan-badan multilateral.

Meskipun secara konseptual sistem ekonomi Indonesia adalah kerakyatan (Pancasila), dalam prakteknya mempunyai kecenderungan kearah sistem ekonomi kapitalistik yang meliberalisasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. Pada orde reformasi ini, kepentingan pasar sangat dominan atas segala arah kebijakan dan ukuran keberhasilannya sehingga masyarakat sebagai subyek dalam hal ini dijadikan obyek ekonomi belaka. Bukti riil besarnya pengaruh pasar beserta lembaga donor terlihat pada kebijakan kenaikan harga BBM yang banyak

---

<sup>58</sup>Carunia Mulya Firdausi. 2000. Tantangan dan Peluang Globalisasi bagi Perekonomian Nasional, Indonesia Menapak Abad 21 :Kajian Ekonomi Politik, cetakan ke-1. Milenium Publisher : Jakarta. Hal. 201-203

dianugerahi oleh kesepakatan-kesepakatan multilateral dan kondisi pasar dunia, bukan atas dasar kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Globalisasi sebagai suatu fenomena global dewasa ini mempunyai pengaruh sangat besar terhadap arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.

Dalam hal ini wacana praktis pasar bebas menjadi dominan dalam pengaturan sumber daya perekonomian yang ada. Sebagai suatu fenomena sosial, ekonomi, dan politik, globalisasi mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada dalam Negara. Menurut Giddens, volatilitas pasar uang dan modal berpengaruh terhadap sistem Negara dan bangsa yang menyebabkan terbentuknya arah kebijakan pemerintah. dan Neo Liberalisme sebagai nafasnya sangat merasuk dalam konstitusi Indonesia sekarang yang mana dengan alasan efisiensi dan efektivitas, Negara dapat melepaskan aset-asetnya supaya keseimbangan pasar dapat terjadi. Jadi, sistem ekonomi kapitalistik sangat mewarnai orde reformasi sekarang ini.<sup>59</sup>

a. Awal Terbentuknya Ekonomi Pancasila di Indonesia

Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, menjelaskan kepada pers bahwa dasar dari peraturan pemerintah (PP) nomer 20, 1994, adalah UUD RI 1945 ayat 2, yaitu: *Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*. Dasar kedua PP itu adalah undang-undang penanaman Modal Asing (UU PMA) nomor 1 1967.

UU PMA 1967 pasal 6 berbunyi: *“Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang*

---

<sup>59</sup>Ibid, hal. 207-208

*penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak seperti pelabuhan, telekomunikasi, pelayaran, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan media massa”.*

PP 20 1994 pasal 5 ayat 1 mengatakan: “perusahaan didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf a, dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu pelabuhan, produksi, transmisi, serta distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan media massa.

UUD RI pasal 33 mengatur; 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. 2, cabang-cabang ekonomi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banayak dikuasai oleh negara. 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

UUD RI 1945 pasal 5 ayat 1 mengatakan: “*presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”.*

Demikianlah kutipan-kutipan dari PP 20 1994, UU PMA 1967, dan UUD RI 1945 untuk mengingatkan kembali dan membandingkan isinya.<sup>60</sup>

Kalau kita simak dan bandingkan PP nomer 20 tahun 1994 bertentangan dengan undang-undang pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa dalam menjalankan hak eksekutifnya, presiden bertindak dengan persetujuan DPR. Dalam menetapkan PP yang biasa memang tidak harus dengan persetujuan DPR. Namun, PP 20 1994

---

<sup>60</sup> Wasid Suwanto, *Mewarisi Gagasan Tan malaka*, hal. 125-126

bukan sembarangan PP karena isinya membatalkan isi UU PMA 1967.<sup>61</sup> Sudah sepantasnya dirundingkan dulu dengan DPR. Bahkan, di antara menteri-menteri sendiri ada yang terkejut serta terheran-heran seperti Menteri penerangan dan Menteri Perhubungan.

Masuknya modal asing dalam bidang media massa jelas bertentangan dengan UU Pokok Pers yang akhirnya menimbulkan kontroversi. Tanggapan dan keterangan pihak pemerintah yang simpang siur menambah tidak logisnya penjelasan yang diberikan, masyarakat hanya dapat geleng-geleng kepala sambil mengusap dada saja.

UU PMA Nomer 1 tahun 1967 menutup modal asing memasuki bidang-bidang usaha penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan PP 20 tahun 1994 menyatakan modal asing dapat memasukinya. Ini berarti membuka dulu sebelum memasukinya.

PP adalah untuk melaksanakan UU. Bagaimana mungkin PP berlawanan dengan isi UU yang dilaksanakannya? Bukankah ini tidak logis? Bukankah ini aneh bin ajaib?<sup>62</sup>

#### b. Awal Terbentuknya Ekonomi Neoliberal di Indonesia

PP 20 1994 merupakan suplemen dari kebijakan neoliberal yang dalam bentuk lebih besarnya bernama GATT. Salah satu kebijakan neoliberal ditandai dengan masuknya secara bebas modal asing ke dalam seluruh sektor ekonomi. Bahkan sektor yang seharusnya berada di tangan pemerintah juga dimasuki.

---

<sup>61</sup> Materi PP Nomer 20 Tahun 1994 Melanggar undang-undang semua diam dan tidak ada yang protes. M.A sebagai pengawal hokum tidak berkata apa-apa.

<sup>62</sup> Wasid Siwanto, *Mewarisi Gagasan Tan malaka*, hal. 126-127

Investasi modal asing ini tidak akan banyak menghasilkan devisa netto. Transfer keuntungannya jauh lebih besar dari pada yang masuk ke Indonesia. Pemodal asing tidak sepenuhnya membiayai investasi dari sumber luar negeri. Melalui bank-bank asing yang ada di Indonesia. Demikian pendapat Sritua Arif.<sup>63</sup>

Ternyata, perkembangan dan kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, ekonomi nasional Indonesia menghadapi persoalan dan kesulitan yang demikian dilematis. Sedemikian dilematisnya sehingga memaksa pemerintah menempuh jalan neoliberal itu.<sup>64</sup>

#### c. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tidak Dijalankan Dengan Efektif

Jika kita pelajari secara seksama, rumusan GBHN baru berupa rumusan dan prinsip yang bersifat umum. Masih diperlukan suatu cetak biru pembangunan nasional yang lebih kongkrit dan rinci.

Di samping itu, pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang telah membuat rumusan konkrit pun belum juga ditindak lanjuti hingga sekarang. Contohnya seperti telah disebutkan di atas bahwa demokrasi ekonomi dalam GBHN jelas dengan tegas menolak *free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli. Tidak ada penjabaran lebih jauh secara konsepsional dan operasional hingga sekarang. Kalangan masyarakat dan DPR bahkan sampai menuntut dikeluarkannya UU Antimonopoli.<sup>65</sup>

Ternyata dengan demikian, karena rumusan yang ada hanya bersifat prinsip umum tanpa cetak biru rinci dan konkrit, ditambah dengan interaksi

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 129

<sup>64</sup> Pembangunan ekonomi yang terlalu mengandalkan modal asing, tidak disesuaikan dengan kemampuan sendiri menyebabkan sistem ekonomi nasional yang direncanakan menjadi tergeser. Tujuan ekonomi negara di-falt a compli-kan oleh kegiatan ekonomi asing.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 134



faktor-faktor internal dan eksternal, GBHN akhirnya terbuka untuk diinterpretasikan dan diimplementasikan secara subyektif menurut visi dan versi pelaksana.

Mungkin presiden soeharto merasakan kelemahan dan kekurangan ini. Beliau mengucapkan ketegasan berupa cetak biru dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1975 tentang masyarakat Pancasila yang sosialis religius.

Selanjutnya dikatakan: *“jelaslah bagi kita, bagaimana sikap hidup kita yang seharusnya dan bagaimana wajah bangsa serta masyarakat Pancasila itu yang sosialis religius. Dan dengan singkat dapat ditegaskan, bahwa masyarakat Pancasila yang sosialis religius itu mempunyai cirri-ciri pokok; tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, kapitalisme, feodalisme, kediktatoran, kolonialisme, dan imperialism. Oleh karena itu kita bersama-sama harus menghapuskannya. Dilain pihak, sikap dan sifat manusia Pancasila adalah selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, saying kepada sesama manusia, suka bekerja, dan rela berkorban demi kepentingan bersama.”*

Jarang sekali ada pernyataan politik demikian singkat berisi sederetan prinsip yang demikian tegas dan jelas seperti itu. Bahkan, Gubernur DKI, Djokropranolo, waktu itu menyatakan tekadnya untuk menjadikan ibukota RI sebagai pelopor dan contoh kota sosialis religius itu.

Pidato kenegaraan itu sudah menggambarkan cetak biru pembangunan nasional, pembangunan masyarakat yang jelas, yaitu sosialis religius yang harus menghapuskan kapitalisme, feodalisme, dictator, kolonialisme, dan imperialism.

Namun, pidato kenegaraan yang maha penting ini pun tidak ada tindak lanjutnya.

Setelah itu, tampak bahwa interpretasi dan implementasi GBHN makin jelas ke arah pembangunan sistem kapitalisme di Indonesia. Factor eksternal makin lama makin kuat menarik pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia ke arah interpretasi dan implementasi kapitalistik dengan segala dampak serta akibatnya.

Kapitalisme Indonesia ini tentu saja sesuai dengan hasil rekayasa struktur kolonialisme Imperialisme kapitalisme Belanda selama setengah abad sebelumnya. Cirri khasnya antara lain adalah tidak adanya golongan tengah pribumi yang kuat karena karena bibit-bibitnya telah dibasmi penjajah yang menerapkan sistem monopoli dan tanam paksa. Pokoknya, rakyat Indonesia merekayasa menjadi bangsa kuli. Untuk menjadi negara kapitalis yang kuat, kita telah ketinggalan sekurang-kurangnya tiga ratus tahun sehingga tak terkejar lagi.<sup>66</sup>

Puncak kecendrungan ke arah kapitalisme adalah keluarnya PP nomer 20 1994 yang menegaskan ekonomi Pancasila menjadi ekonomi neoliberal.

Dalam bentuk lebih besar adalah GATT yang telah menjadi WTO. Dalam kondisi dan situasi itulah lahir APEC.

Identitas APEC adalah liberalisasi perdagangan dan investasi. Liberalisasi di sini berasal dari konsep neoliberal yang di anut GATT. Oleh sebab itu, sungguh

---

<sup>66</sup> Menempuh jalan pembangua ekonomi kaptalisme tanpa golongan tengah pribumi adalah bertentangan dengan hakekat sejarah. Jika dipaksakan, maka yang akan menjadi kapitalis adalah golongan Timur Asing (seperti Cina dan India). Sperti piramida struktur ekonomi Indonesia yang diciptakan belanda.

janggal jika abunada orang yang mengatakan bahwa liberalisasi APEC tidak ada hubungannya dengan liberalisme.<sup>67</sup>

Salah satu kebijakan neoliberal adalah masuknya secara bebas modal asing ke dalam seluruh sektor ekonomi seperti yang tergambar dalam PP 20 1994,

Pertemuan APEC di bogor memang sebagai pertemuan yang sukses besar. Pihak yang mendapat keuntungan besar dari pertemuan itu tentu saja memujinya setinggi langit. Lain halnya dengan Malaysia. Dr. Mahathir Mohammad memberikan banyak catatan dan peringatan pada kesepakatan APEC. Sebab dia menyadari konsekuensi dan dampaknya. Khususnya bagi Malaysia.

Bagi Indonesia, semua sektor usaha dan jasa boleh dikatakan menyatakan khawatir tidak siap atau tidak mampu menghadapi *free fight liberalism* dengan pihak asing. Kekhawatiran seperti itu dapat kita simak dari media massa. Presiden Soeharto menegaskan dan mengingatkan, siap atau tidak, perdagangan bebas telah menjadi pilihan dunia. Demikianlah adanya.<sup>68</sup>

## **B. Neoliberalisme di Dunia**

Pada tahun 1928-1929, sekelompok ahli (di antaranya Wilhelm Ropke, Walter Eucken, Franz Bohm, Alexander Rustow, Alfred Muller Armack, dll) yang tergabung dalam “Mazhab freiburg” mengembangkan gagasan ekonomi politik yang beraliran liberal. Gagasan-gagasan mereka disebarkan melalui sebuah jurnal berjudul *Ordo: jahrbuch fir die Ordnung von Witscharft und Gesselsschaft*.

---

<sup>67</sup> Wasid Siwanto, *Mewarisi Gagasan Tan malaka*, hal. 136-137

<sup>68</sup> *Ibid*,

Karena nama jurnal tersebut, gagasan mereka lebih populer disebut “Ordo Liberal”.

Sebutan lain bagi aliran pemikiran “Ordo Liberal” adalah “Neoliberal”. Akan tetapi dalam hal ini harus dicatat bahwa “Neoliberal” yang dikembangkan kelompok Ordo Liberal ini tidak sama dengan mazhab “Neoliberal” yang kita kenal seperti sekarang ini. Pemberian embel-embel “Neo” bagi pemikiran kelompok “Ordo Liberal” ini hanya untuk membedakan dengan pandangan Liberal klasik abad ke 18 dan 19.

Perbedaan yang mendasar dari pemikiran Ordo Liberal sesuai mazhab Freiburg ini dibandingkan dengan pandangan Liberal klasik dan Neoklasik ialah bahwa pandangan Ordo Liberal sudah mengakomodasi kritik yang dilancarkan pakar-pakar Sosialis/Marxis terhadap Liberalisme klasik. Jadi, kalau pemikiran-pemikiran aliran Neoklasik masih dalam kerangka ekonomi pasar, sistem yang di usung aliran Ordo Liberal adalah “ekonomi pasar sosialis” (*Soziale Marktwirtschaft*) atau “Social Market Ekonomi” yaitu sebuah sistem ekonomi bebas, namun dijaga dengan berbagai regulasi pemerintah agar terhindar dari konsentrasi kekuasaan ekonomi sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Sebagai sebuah sistem, ekonomi pasar sosialis sudah berusaha memerangi kekuasaan sektor public maupun privat atas pasar sekaligus memerangi pasar

bebas tanpa aturan maupun kecenderungan perencanaan yang bersifat otoriter (friedlich, 1955).<sup>69</sup>

Para pakar yang menggagas Ordo Liberal tidak percaya bahwa pasar dan persaingan atau kompetisi sebagai sesuatu yang alami dan berjalan menurut hukum universal. Bagi mereka, pasar hanya merupakan salah satu dari berbagai model hubungan sosial yang merupakan hasil bentukan manusia. Karena pasar ini merupakan hasil ciptaan manusia, bukan sesuatu yang alami, maka lembaga yang bernama pasar ini bisa saja dihapuskan atau dibatalkan. Para ahli Ordo Liberal percaya bahwa kinerja pasar percaya bahwa kinerja pasar memerlukan tindakan politik. Dalam hal ini, pemerintah harus harus menjalankan fungsinya menciptakan Wim yang kondusif sehingga pasar bisa beroperasi secara adil dalam suasana kompetitif.

#### a. Hubungan Neoliberalisme, Pasar, Negara, dan Masyarakat

Penelitian Robert Bates adalah salah satu pilar penting dari proses perkembangan pendekatan EPB, yang memperlihatkan keberhasilan baru dalam menganalisis hubungan rasional antara petani dan politik, negara atau pemerintah (Bates, Berkeley: University of California Press, 1981). Dalam perspektif EPB ini interaksi kolektif yang melibatkan masyarakat luas dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dapat dijelaskan secara teoritis dan konseptual.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ismail, *Ekonomi Politik Sebuah Teori dan Aplikasi*, hal. 69-70

<sup>70</sup> Ismail, *Ekonomi Politik Sebuah Teori dan Aplikasi*, hal. 197

Biasanya analisis ekonomi tidak pernah keluar dari lingkup mekanisme pasar dan analisis politik sulit menjangkau fenomena-fenomena ekonomi masyarakat. Dalam penelitian Bates ini ditunjukkan dengan gambling bagaimana pasar berhubungan dengan negara, petani sebagai produsen berinteraksi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Dalam studi di Afrika Tropis, Bates berhasil melihat kaitan antara masyarakat petani dengan negara, yang mengambil keputusan-keputusan untuk public. Bates mengemukakan argumentasi temuan penelitiannya bahwa krisis pangan di Afrika Tropis terjadi karena kesalahan kebijakan, meskipun demikian, meskipun kebijakan itu sendiri secara normatif ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut pada dasarnya dimanfaatkan untuk membantu kepentingan politik jangka pendek dari penguasa dalam rangka politik pangan nasional.

Namun, rancangan kebijakan ini salah sehingga dampaknya buruk terhadap petani kecil. Hal itu terjadi karena sistem insentif yang kurang baik, sehingga tidak memberi pengaruh dan efek stimulasi ekonomi bagi petani untuk terlibat dalam proses produksi pangan secara massal. Tentu saja petani bersikap rasional, baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan kelompoknya. Sikap itu adalah tanggapan yang bersifat menolak dan bahkan menentang kebijakan, yang tidak rasional dilihat dari sisi kepentingan petani. Sikap seperti ini







pemerintah dengan menyerbu kota, meskipun dengan pekerjaan yang tidak pasti sekalipun.

Batas menerangkan fenomena ini sebagai sikap rasional petani dimana tindakan protes yang dilakukan mempunyai basis pertimbangan rasional, bukan sikap moral sebagaimana diterangkan oleh James Scott dalam kasus petani di Vietnam. Institusi pasar digunakan sebagai alat politik untuk menolak negara dan rangkaian kebijakan kebijakannya. Atas dasar pertimbangan – pertimbangan rasional. Yang berkenaan dengan kepentingan diri maupun kelompok kolektifnya. Pasar adalah instrument paling mungkin yang dapat dipakai oleh petani untuk berinteraksi dengan kebijakan yang tidak masuk akal.

Pasar kemudian dipakai secara berlanjut oleh petani secara kolektif sebagai instrument politik yang paling tepat dalam rangka penolakan tersebut. Sementara itu, para politisi memanfaatkan pasar sebagai instrument control atas masyarakat dalam hal ini terhadap petani. Jadi, kebijakan tersebut tidak berhasil mencapai tujuannya karena tanggapan petani yang rasional menolaknya mentah – mentah.

Sikap dan kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak rasional dipandang dari sudut kepentingan petani. Sementara itu, petani bersikap rasional terhadap kebijakan yang tidak rasional tersebut. Analisis terhadap fakta ini kemudian bisa



mulanya Neoliberalisme lahir sebagai hasil dari ekonomi politik, namun daya pengaruh pasar bebas telah menyentuh perdebatan tentang kebudayaan, agama dan filsafat sosial.

Secara skematik, mengutip rumusan Susan George (dalam Mas' oed, 2002)<sup>74</sup>, ide dasar Neoliberalisme tersusun atas beberapa ramuan pemikiran berikut ini :

1. Pasar harus diberi kebebasan untuk membuat keputusan sosial dan politik yang penting.
2. Negara harus secara sukarela mengurangi peranannya dalam ekonomi
3. Perusahaan harus diberi kebebasan total
4. Serikat buruh harus diberangus
5. Proteksi sosial bagi warga Negara harus dikurangi.

Sementara pada level Internasional, Neoliberalisme mengutamakan tiga pendekatan pokok :

1. Perdagangan bebas untuk barang dan jasa
2. Kebebasan sirkulasi kapital
3. Kebebasan investasi

Pada tingkat operasional, skema ideologis ini dijabarkan dalam seperangkat paket kebijakan ekonomi yang harus diterapkan khususnya oleh

---

<sup>74</sup>Lihat dalam Mas' oed, Mohtar, 2002, tantangan Internasional dan Keterbatasa Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan.







Perbedaan mendasar Tan Malaka dengan tokoh nasional lainnya adalah, Tan Malaka tidak menginginkan proses kemerdekaan Indonesia dengan cara bernegosiasi, Tan Malaka dalam buku Gerpoleknya menginginkan kemerdekaan 100%. Yang di maksud dengan kemerdekaan 100% disini ialah dimana revolusi Indonesia tidak hanya sebatas revolusi nasional saja akan tetapi merupakan revolusi rakyat. Dengan kata lain, dimana asset-aset Negara atau rakyat beserta alat produksi harus direbut kembali oleh Negara dan rakyat Indonesia. Hal ini dirasa penting oleh Tan Malaka karena perjuangan rakyat Indonesia biar tidak terkesan sia-sia. Dengan merebutnya kembali alat produksi maka rakyat Indonesia bisa leluasa mengelolanya kembali, dengan begini maka revolusi Indonesia benar-benar terasa kata Tan Malaka.

Revolusi Indonesia merupakan revolusi masalah politik dan ekonomi tak bisa lagi di pisah-pisahkan. Perang kemerdekaan rakyat Indonesia berarti kemerdekaan politik dan perjuangan jaminan ekonomi. Kemerdekaan nasional yang serentak berarti menjamin keadaan ekonomi dan sosial. Hasrat perang kemerdekaan Indonesia tidak saja untuk melenyapkan penindasan dan mendapatkan jaminan hidup dalam masyarakat baru yang di perjuangkan.

Tan Malaka dalam buku gerpoleknya menganggap bahwa revolusi Indonesia, bukanlah revolusi nasional semata, seperti diciptakan oleh segelintir orang Indonesia untuk kepentingan diri sendiri dan siap menyerahkan semua sumber pencahariannya untuk kolonial.





kemerdekaan nasional dan mengembalikan kapitalisme dan imperialism internasional.

Sesungguhnya dengan kecerobahan tentara Belanda menyerang Republik Indonesia dan bermaksud hendak meruntuhkannya, maka Indonesia yang sudah merdeka semenjak 17 Agustus 1945 itu sepenuhnya berhak menyita hak milik si penyerang yang ceroboh itu.

Dalam pergolakan politik dan ekonomi Indonesia hari ini tentunya jelas bahwa ketergantungan Indonesia terhadap Negara asing masih kuat, sehingga mudah di monopoli oleh Negara asing yang mempunyai kepentingan di Indonesia. Monopoli yang di mainkan adalah ideology neo liberalism dan konsep demokrasi yang saat ini masih berkembang dalam hasanah pengetahuan.

Relevansi dari pemikiran Tan Malaka cukup jelas jika di kaitkan dengan konsep politik ekonomi hari ini, yaitu menolak kapitalisme di Indonesia. Sikap ini dibangun oleh Tan Malaka mulai dari pra kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan yang mutlak untuk bangsa Indonesia dan sesuai dengan hukum internasional. Dengan begitu Indonesia mempunyai hak untuk mengambil kembali alat produksi yang telah dirampas bangsa asing dan memberikan alat produksi tersebut kepada rakyat Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA).

Salah satu term kapitalisme diatas mengatakan bahwa mendorong investasi asing, ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah masuk kedalam





## B. KESIMPULAN

1. Tan Malaka melihat revolusi Indonesia tidak berhenti pada revolusi politik semata-mata, namun melihatnya sebagai revolusi yang lebih global sifatnya, mulai dari revolusi menghapuskan feodalisme, revolusi kemerdekaan dan revolusi sosial. Tentang revolusi sosial yang isinya harapan terhadap hadirnya masyarakat yang adil dan makmur untuk sebagian besar *funding father* di artikan sebagai penolakan terhadap kapitalisme. Dalam konsep mensejahterakan rakyat Indonesia Tan Malaka menginginkan kemerdekaan Indonesia 100%, artinya kemerdekaan Indonesia benar-benar di akui oleh Negara internasional dan intervensi asing benar-benar tiada di bumi Indonesia ini. Seperti alat produksi yang dirampas oleh penjajah itu dikembalikan lagi dan rakyat Indonesia yang akan membangun kembali alat-alat produksi yang telah dirampasnya. Alat produksi disini ialah perkebunan, tambang, dan kekayaan alam lainnya. Dalam pandangan politiknya Tan Malaka menginginkan Indonesia menganut ideology sosialime dari pada kapitalisme, karena Tan Malaka menganggap sosialismelah yang pas dengan kondisi cultur dan pemikiran rakyat Indonesia. Sedangkan kapitalisme menurut Tan Malaka di anggap sebagai monopoli barat terhadap negara dunia ketiga yang dalam hal ini adalah Indonesia.
2. Secara konseptual sistem ekonomi Indonesia adalah kerakyatan (Pancasila), dalam prakteknya mempunyai kecenderungan kearah sistem ekonomi kapitalistik yang meliberalisasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. Pada orde reformasi ini, kepentingan pasar sangat dominan atas segala arah

kebijakan dan ukuran keberhasilannya sehingga masyarakat sebagai subyek dalam hal ini dijadikan obyek ekonomi belaka. Dalam sistem ekonomi, Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis, dimana rakyat yang menjadi obyek dari kebebasan ekonomi. Rakyat adalah obyek dari ekonomi global, market pasar ditentukan oleh tingginya konsumen, konsumen disini adalah rakyat. Sedangkan pemerintah tidak ikut campur dalam kebijakan ekonomi. Ini yang disebut dengan kapitalisme di negara demokratis kata Tan Malaka. Tan Malaka dalam konsep ekonomi politiknya menolak kapitalis di Indonesia, sikap ini ditunjukkan Tan Malaka dalam setiap karya-karyanya, Tan Malaka teguh pada pendiriannya yang berujung pada gerakan anti terhadap bentuk imperialisme dan kapitalis di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan konteks ekonomi politik Indonesia hari ini, dimana liberalisasi ekonomi sedang berlangsung. Serta adopsi pemikiran barat yang secara langsung di adopsi oleh Indonesia. Ini menjadi kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia, dan meng agungkan pemilik modal dan investor asing yang semakin besar setiap tahunnya. Korban dari kebijakan ini menurut konsep Tan Malaka adalah rakyat Indonesia, dimana notabeni masyarakat Indonesia masih lemah dalam sector pengetahuan dan ekonomi. Sehingga terbentuklah strata social di tengah masyarakat. Strata sosial itu disebut oleh Marx adalah bourjuasi sebagai kaum pemodal dan ploretar sebagai kaum buruh.

### C. SARAN

1. Dengan sistem demokrasi yang hari ini sedang berlangsung mestinya Indonesia dalam sistem ekonominya menganut ekonomi kerakyatan, hal ini di perlukan untuk membangun ekonomi mikro yang kuat di setiap lapisan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah kemandirian ekonomi untuk mencapai ekonomi makro. Ekonomi kerakyatan seperti diatas gunanya tidak lain adalah mengurangi tingkat ekspor impor, karena melihat potensi alam di Indonesia begitu besar. Namun yang menjadi catatan adalah sumber daya manusia yang lemah, ini bisa diantisipasi dengan program pemerintah terhadap pendidikan wajib kepada setiap masyarakat. Kebijakan ini bukan hal yang mustahil sebenarnya karena dalam UUD 1945 sudah di atur. Bahwasanya Negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa.
2. Ekonomi dan politik adalah sebuah sistem dalam Negara yang saling ketergantungan, kebijakan politik akan mempengaruhi pada APBN, sebaliknya seperti itu kebijakan ekonomi akan mempengaruhi pada kebijakan politik. Mengacu pada ekonomi kerakyatan diatas mestinya kebijakan politik yang harus dilakukan adalah memperkuat lembaga ekonomi, seperti koperasi. Selain itu partai politik disini harus lebih selektif untuk memilih calon legislatif, karena dengan begitu daya tawar lembaga politik di Indonesia semakin kuat dan besar, sehingga bisa dianggap mampu menjalani roda pemerintahan dengan baik. Ini juga akan menekan tingkat korupsi yang hari ini semakin besar. Eksekutif, legislatif dan yudikatif ini adalah sebuah









